

The Effect of Accountability, Transparency and Internal Supervision of Regional Financial Management on the Regional Financial Performance of Rote Ndao Regency

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Internal Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao

Margareta Lolu^{1*}, M. E. Perseveranda², Yolinda Yanti Sonbay³, Henny A. Manafe⁴, Rere Paulina Bibiana⁵

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang^{1,2,3,4,5}

m4rl0sumb4@gmail.com, perseverandaerse@gmail.com, yolinda81@gmail.com,
hennyunwira@gmail.com, paulinabibiana18@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran akuntabilitas, transparansi, pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao serta menganalisis pengaruh masing-masing faktor terhadap kinerja keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh simultan antara akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan internal terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Untuk menjawab tujuan penelitian ini digunakan alat analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao telah sangat akuntabel, namun transparansi masih perlu ditingkatkan, dan pengawasan internal belum dilaksanakan secara optimal. Secara keseluruhan, kinerja keuangan daerah dinilai kurang baik. Akuntabilitas terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah, sementara transparansi tidak memberikan pengaruh signifikan. Pengawasan internal juga menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Secara simultan, akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga penerapan ketiganya secara bersama-sama dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Rote Ndao.

Kata kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Internal, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan

ABSTRACT

This study aims to determine the description of accountability, transparency, and internal supervision of regional financial management in Rote Ndao Regency and to analyze the influence of each factor on regional financial performance. In addition, this study also aims to determine the simultaneous influence of accountability, transparency, and internal supervision on regional financial performance. This study is a quantitative study. To answer the objectives of this study, descriptive statistical analysis tools and inferential statistics were used. The results of the study indicate that regional financial management in Rote Ndao Regency has been very accountable, but transparency still needs to be improved, and internal supervision has not been implemented optimally. Overall, regional financial performance is considered less than good. Accountability has been shown to have a significant influence on improving regional financial performance, while transparency does not have a significant influence. Internal supervision also shows a significant influence on regional financial performance. Simultaneously, accountability, transparency, and internal supervision have a significant influence on regional financial performance, so that the implementation of the three together can improve the regional financial performance of Rote Ndao Regency.

Keywords: Accountability, Transparency, Internal Supervision, Regional Financial Management, Financial Performance

1. Pendahuluan

Sejak terjadinya reformasi di tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Masyarakat menuntut adanya perubahan perbaikan di segala bidang, salah satu

produknya adalah lahirnya otonomi daerah. Sistem otonomi daerah dianggap sebagai salah satu sistem yang lebih dinamis dan pro terhadap rakyat (Undang-undang Nomor 22 tahun 1999; Undang-undang Nomor 32 tahun 2004). Otonomi daerah merupakan suatu sistem pemerintahan desentralisasi, di mana daerah mengatur dan mengurus sendiri pelaksanaan pemerintahan. Namun dalam perjalanannya, pelaksanaan pemerintahan secara otonomi tidaklah berjalan dengan mulus, muncul kasus-kasus korupsi yang menyandung sebagian oknum dari kalangan pejabat pemerintah daerah, yang memanfaatkan kelemahan sistem desentralisasi (Winoto & Falikhatun, 2015), sebagaimana Data kasus korupsi daerah yang dikemukakan oleh ICW (*Indonesia Corruption Watch*) sejak diberlakukan otonomi daerah, sebanyak 183 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi dengan tingkat korupsi tertinggi terjadi pada jabatan Bupati yakni sebanyak 110 kasus. Hal ini menjelaskan bahwa sistem desentralisasi menjadi ladang bagi sebagian oknum untuk melakukan korupsi, karena mereka memiliki kendali penuh terhadap daerah yang dipimpin.

ICW (*Indonesia Corruption Watch*) mengemukakan, bahwa tindakan korupsi tidak hanya terjadi pada tingkat kepala daerah saja, di mana pejabat pemerintah daerah juga terlibat di dalamnya, bahkan sampai pada oknum pejabat desa dan masyarakat, korupsi paling banyak terjadi di sektor desa pada 2022, yakni 155 kasus. Jumlah itu setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum pada 2022. Kenyataan ini, berdasarkan kacamata akuntansi menunjukkan adanya masalah pada kinerja keuangan daerah, yang adalah output dari pengelolaan keuangan daerah. Syahrinda (2009) menyatakan bahwa dari sekian banyak masalah yang ada pada pemerintah daerah salah satunya adalah tentang akuntansi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu dilakukan dengan pengawasan yang ketat. Halim A. (2004: 307-308), mengemukakan bahwa pengawasan keuangan negara dan daerah pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan negara dan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Menurut Ronald dan Sarmiyatiningsih (2010) kinerja keuangan merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang dicapai sesuai dengan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Pengukuran kinerja keuangan memiliki banyak tujuan, paling tidak untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dan transparansi publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Menurut Ibnu S., (1986:199) Kinerja Keuangan Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Sejak pemerintah memberlakukan kebijakan otonomi daerah pada tahun 1999 yang ditandai dengan terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota sudah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Hadirnya otonomi daerah diharapkan daerah dapat menjadi semakin mandiri sehingga mampu mengelola dan mengatur segala urusan daerahnya serta dapat membiayai pembangunan daerahnya sendiri untuk kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mewujudkan terciptanya daerah yang mandiri, pada tahun 2001, pemerintah menerapkan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal juga memperkuat dan memperluas kewenangan daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Semakin tinggi pendapatan pajak daerah maka semakin baik kinerja keuangan daerah tersebut karena dengan begitu maka daerah tersebut dapat memenuhi kebutuhan operasional sendiri tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (Prastiwi & Aji, 2020). Sebaliknya, jika pendapatan pajak daerah kecil maka dapat mencerminkan jika daerah tersebut belum mampu mengelola keuangan dan mencukupi kebutuhannya sendiri dengan kata lain kinerja keuangan daerah tersebut dapat dikatakan belum baik.

Mardiasmo (2004) menegaskan bahwa system pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Ini berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang akuntabel. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur akuntabilitas yang dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten Rote Ndao meliputi Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*) dan Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*). UU 23/2014 pasal 283, Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan Pemerintahan. Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme mendefinisikan transparansi sebagai azas untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Menurut Vera jasini Putri (2003;165) Transparansi anggaran berarti keterbukaan dalam setiap proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah, sehingga masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses penganggaran daerah karena menyangkut kepentingan, aspirasi dan upaya pemecahan permasalahan yang mereka hadapi untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, masyarakat dan pihak-pihak terkait dapat memiliki akses terhadap informasi tentang pengelolaan anggaran daerah sehingga pengelolaan anggaran lebih efektif.

Sumarsono (2010) Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta proses kegiatan yang ditunjukan agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum pengawasan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mencegah dan memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi (Wiguna 2015). Dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan daerah secara disiplin berarti penyimpangan dan kebocoran penggunaan dana yang merugikan pemerintah daerah dapat dicegah atau dikurangi menjadi seminimal mungkin, yang berarti *value of money* (nilai uang) dapat ditingkatkan.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pesi Suryani (2019) dengan judul Pengaruh Partisipasi Publik, Akuntabilitas, Transparansi dan Integritas Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan bahwa Partisipasi public, Integritas dan Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Transparansi tidak terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian yang dilakukan oleh Tari Mellisa Rafar (2015) dengan judul Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah

Kabupaten Aceh Utara) menunjukkan bahwa Kompetensi pengelola keuangan dan akuntabilitas baik secara bersama sama maupun parsial berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Aceh Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh Dito Aditia Darma Nasution (2018) dengan judul Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah menunjukkan hasil penelitiannya bahwa Secara parsial pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; Secara parsial transparansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; Secara simultan pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian Matande (2020) variabel pendapatan pajak daerah menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh Siregar (2020) yang menyimpulkan bahwa pendapatan pajak daerah memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Tinjauan Pustaka

Kerangka Teoritis

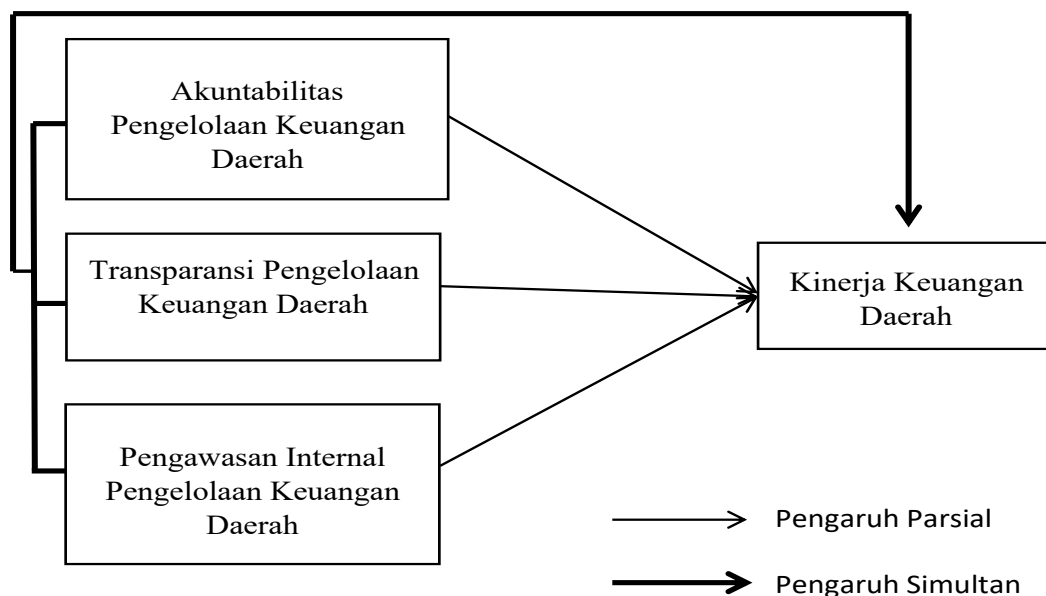
Menurut Adisasmita (2011:30), Akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi. Setiap instansi, lembaga atau organisasi pemerintah pasti menginginkan agar semua aktivitas yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan sebelumnya termasuk keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao diharapkan pemerintah dapat mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerahnya secara akuntabel sehingga bisa mencapai kinerja keuangan daerah yang lebih baik. Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dito Aditia Darma Nasution (2018) menunjukkan hasil penelitiannya bahwa Secara parsial pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Vera jasini Putri (2003;165) Transparansi anggaran berarti keterbukaan dalam setiap proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah, sehingga masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses penganggaran daerah karena menyangkut kepentingan, aspirasi dan upaya pemecahan permasalahan yang mereka hadapi untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, masyarakat dan pihak-pihak terkait dapat memiliki akses terhadap informasi tentang pengelolaan anggaran daerah. Hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dengan lebih efektif sehingga menciptakan kinerja keuangan yang lebih baik. Pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Maria Laetitia Boliina Kromen, Dkk (2023) menunjukkan bahwa Pengelolaan keuangan daerah berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan daerah; Akuntabilitas berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan daerah; Transparansi berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan daerah; Tata kelola keuangan daerah, akuntabilitas maupun transparansi berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan daerah.

Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta proses kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sumarsono: 2010). Secara umum pengawasan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mencegah dan memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi (Wiguna 2015). Dalam

melaksanakan fungsi pengawasan keuangan daerah secara disiplin berarti penyimpangan dan kebocoran penggunaan dana yang merugikan pemerintah daerah dapat dicegah atau dikurangi menjadi seminimal mungkin, yang berarti value of money (nilai uang) dapat ditingkatkan sehingga kinerja keuangan daerah menjadi lebih baik. Pengawasan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Enita Binawati,Dkk. (2022) menunjukkan Bahwa Pengawasan Keuangan Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah;

Akuntabilitas, transparansi dan Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuqa Diana Khairi (2021) menunjukkan bahwa Pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Solok. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas, transparansi dan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah akan memberikan dampak positif dalam pengelolaan anggaran daerah sehingga Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Serta dengan adanya pengawasan internal keuangan daerah yang disiplin diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sehingga dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan dana daerah dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah yang lebih baik.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Akuntabilitas, transparansi dan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah serta kinerja keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao baik.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao
4. Pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao

5. Akuntabilitas, transparansi dan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di 29 kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Februari 2024. Populasi penelitian ini adalah semua pengelola keuangan pada 29 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Rote Ndao. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas/Badan, kepala bagian dan kepala sub bagian keuangan dari 29 OPD yang ada di Kabupaten Rote Ndao sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 87 orang responden. Untuk menjawab tujuan penelitian ini digunakan alat analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial.

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis Statistik Inferensial

Analisis regresi linear berganda

Table 1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		Std. Error			
Model		B		Beta	t Sig.
1	(Constant)	-10.021	5.321		-1.883 .063
	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X1)	.650	.188	.287	3.461 .001
	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)	.062	.093	.056	.666 .507
	Pengawasan Internal Pengelolaan Keuangan Daerah (X3)	.755	.105	.595	7.168 .000

a. Dependent Variable: KINERJA KEUANGAN DAERAH (Y)

(Sumber: data diolah, 2024)

Tabel 1 yaitu menguji pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, transparansi pengelolaan keuangan daerah, pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao sehingga model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

$$Y = -10.021 + 0,650X_1 + 0,062X_2 + 0,755X_3$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar -10.021 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, transparansi pengelolaan keuangan daerah, dan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah) diasumsikan tidak mengalami perubahan/konstan (sama dengan 0) maka nilai Y (kinerja keuangan daerah) adalah sebesar -10.021.
2. Koefisien variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (X1) sebesar 0,650 berarti setiap kenaikan variabel akuntabilitas sebesar 1 point, maka kinerja keuangan daerah akan naik sebesar 0,650 point dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.

- 3. Koefisien variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah (X2) sebesar 0,062 berarti setiap kenaikan variabel transparansi sebesar 1 point, maka kinerja keuangan daerah akan naik sebesar 0,062 point dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.
- 4. Koefisien variabel pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah (X3) sebesar 0,755 berarti setiap kenaikan variabel pengawasan internal sebesar 1 point, maka kinerja keuangan daerah akan naik sebesar 0,755 point dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.

Dari hasil analisis regresi yang telah dilakukan maka temuan empiris yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas, transparansi dan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah maka akan dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Rote Ndao.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

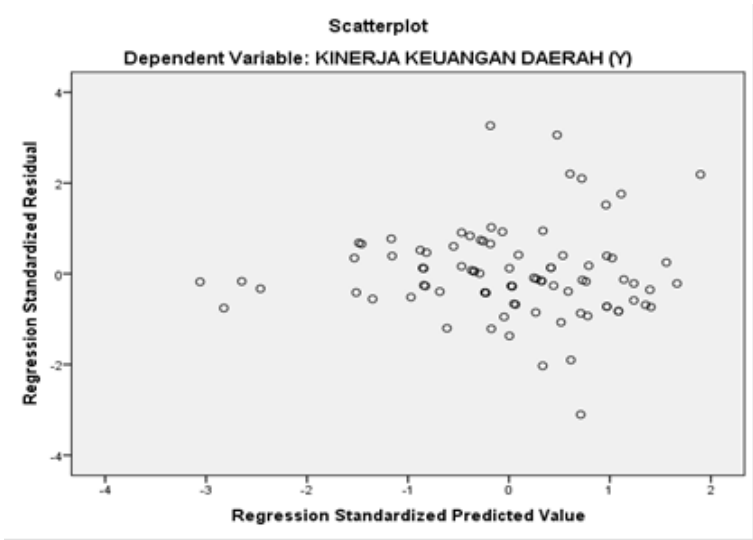
Table 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		87
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.10335913
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.092
	Negative	-.093
Test Statistic		.093
Asymp. Sig. (2-tailed)		.059 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

(Sumber: data diolah, 2024)

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.12, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini terdistribusi normal, karena nilai probabilitas yang dihasilkan yaitu 0,059 > 0,05. Maka model regresi ini layak untuk digunakan analisis selanjutnya.

Uji Heterokedastisitas



Gambar 2. Grafik Scatterplot Heterokedastisitas
(Sumber: data diolah, 2024)

Berdasarkan gambar di atas titik-titik pada scatterplot menyebar di kiri dan di kanan titik 0 pada sumbu X serta menyebar di bawah dan diatas titik 0 pada sumbu Y, dan juga tidak membentuk pola tertentu, ini menunjukkan bahwa data-data Kinerja Keuangan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengawasan Internal Pengelolaan Keuangan Daerah tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Table 3. Hasil Uji Multikolinearitas

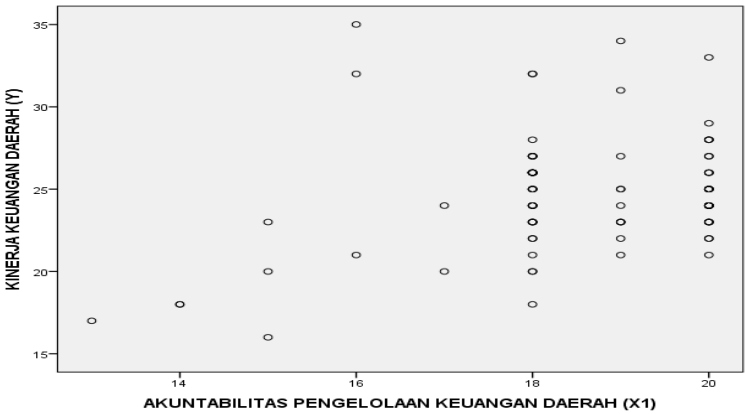
Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standar dized Coefficients				
					Collinearity Statistics			
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-10.021	5.321		-1.883	.063		
	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X1)	.650	.188	.287	3.461	.001	.975	1.026
	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)	.062	.093	.056	.666	.507	.953	1.049
	Pengawasan Internal Pengelolaan Keuangan Daerah (X3)	.755	.105	.595	7.168	.000	.974	1.026

a. Dependent Variable: KINERJA KEUANGAN DAERAH (Y)
(Sumber: data diolah, 2024)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.13, dapat dilihat bahwa tolerance dan VIF dari variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (X1) adalah sebesar 0,975 dan 1,026, untuk variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah (X2) adalah sebesar 0,953 dan 1,049, untuk variabel pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah (X3) adalah sebesar 0,974 dan 1,026, Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi tidak mengandung masalah multikolinearitas yang artinya tidak ada korelasi diantara variabel-variabel bebas sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut karena nilai tolerance berada di bawah 1 dan nilai VIF jauh dibawah angka 10.

Uji Linearitas

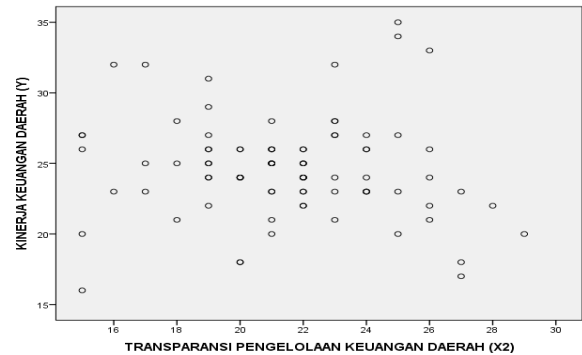
Kinerja Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah



Gambar 3. Grafik Scatterplot Lineraritas Akuntabilitas
(Sumber: data diolah, 2024)

Berdasarkan gambar di atas titik-titik pada scatterplot menyebar dari arah kiri ke bawah dan arah kanan ke atas sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel kinerja keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah bersifat linear.

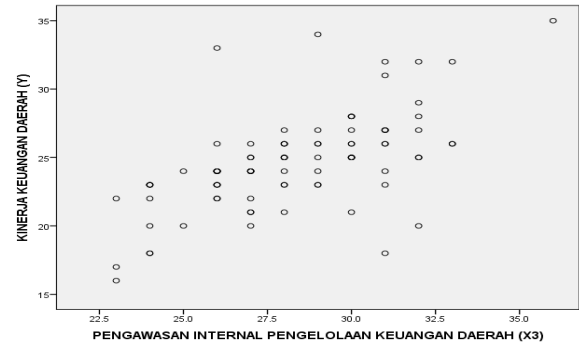
Kinerja Keuangan Daerah dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah



Gambar 4. Grafik Scatterplot Linearitas Transparansi
(Sumber: data diolah, 2024)

Berdasarkan gambar 4 di atas titik-titik pada scatterplot menyebar tidak beraturan sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel kinerja keuangan daerah dan transparansi pengelolaan keuangan daerah bersifat tidak linear.

Kinerja Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal Pengelolaan Keuangan Daerah



Gambar 5. Grafik Scatterplot Linearitas Pengawasan
(Sumber: data diolah, 2024)

Berdasarkan gambar di atas titik-titik pada scatterplot menyebar dari arah kiri ke bawah dan arah kanan ke atas sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel kinerja keuangan daerah dan pengaawsan internal pengelolaan keuangan daerah bersifat linear.

Uji Hipotesis dan Kaidah Pengambilan Keputusan
Uji Parsial (uji t)

Table 4. Hasil Uji Parsial (uji t)
Coefficients^a

--

		Unstandardize		Standardiz		
		d Coefficients		ed		
				Coefficient		
				s		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-10.021	5.321		-1.883	.063
	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X1)	.650	.188	.287	3.461	.001
	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)	.062	.093	.056	.666	.507
	Pengawasan Internal Pengelolaan Keuangan Daerah (X3)	.755	.105	.595	7.168	.000

a. Dependent Variable: KINERJA KEUANGAN DAERAH (Y)
(Sumber: data diolah, 2024)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah
Hasil dari pengujian hipotesis pertama akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dikarenakan pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,01 maka keputusannya adalah menolak Ho dan menerima H1, artinya secara parsial variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable kinerja keuangan daerah.
2. Pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah
Hasil dari pengujian hipotesis kedua transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dikarenakan pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,507 maka keputusannya adalah menerima Ho dan menolak H2 artinya secara parsial variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh yanag tidak signifikan terhadap variable kinerja keuangan daerah.
3. Pengaruh pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah
Hasil dari pengujian hipotesis ketiga pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dikarenakan pengaruh pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 maka keputusannya adalah menolak Ho dan menerima H3, artinya secara parsial varaibel pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable kinerja keuangan daerah.

Uji Simultan (uji F)

Table 5. Hasil Uji Simultan (uji F)

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F Sig.
1	Regression	474.548	3	158.183	21.926 .000 ^b
	Residual	598.785	83	7.214	

Total	1073.333	86
-------	----------	----

- a. Dependent Variable: KINERJA KEUANGAN DAERAH (Y)
b. Predictors: (Constant), PENGAWASAN INTERNAL PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (X3), AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (X1), TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (X2)

(Sumber: data diolah, 2024)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistic Anova. Uji F dilakukan menggunakan aplikasi SPSS Statistic 24, yakni membandingkan sig hasil uji F Anova terhadap alpha (α) penelitian sebesar 0,05 (5%). Berdasarkan tabel 4.15 diatas dapat dijelaskan hasil penelitian ini sebagai berikut :

Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah.

Hasil dari pengujian hipotesis akuntabilitas, transparansi dan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dikarenakan pengaruh Bersama-sama (simultan) akuntabilitas, transparansi, pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05 maka keputusannya adalah Ho di tolak dan Ha diterima. Artinya secara simultan variable akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (X1), transparansi pengelolaan keuangan daerah (X2), pengawasan internal keuangan daerah (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja keuangan daerah (Y) di kabupaten Rote Ndao.

Koefisien Determinan (R²)

Table 6. Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.665 ^a	.442	.422	2.686

- a. Predictors: (Constant), PENGAWASAN INTERNAL PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (X3), AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (X1), TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (X2)

(Sumber: data diolah, 2024)

Berdasarkan tabel 6, diperoleh hasil bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,422 hal ini berarti akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, transparansi pengelolaan keuangan daerah, pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah mampu menjelaskan kinerja keuangan daerah sebesar 42,2%, setelah disesuaikan terhadap sampel dan variabel independen. Sedangkan sisanya 57,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Hasil dari pengujian hipotesis akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dikarenakan pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,01 maka keputusannya adalah menolak Ho dan menerima H1, artinya secara parsial variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable kinerja keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Kusumastuti (2014:2) akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya. Sehingga apabila akuntabilitas meningkat

maka kinerja keuangan daerah juga akan meningkat, sebaliknya apabila akuntabilitas menurun maka kinerja keuangan daerah juga akan menurun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Rote Ndao dipersepsikan sangat baik oleh responden dengan kata lain pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Rote Ndao sudah dilaksanakan secara akuntabel. Hal ini dapat dilihat dari indikator akuntabilitas horizontal bahwa pemerintah daerah menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana APBD oleh Pemerintah Daerah dan dana APBN oleh Pemerintah Pusat kepada Masyarakat. Ditinjau dari akuntabilitas vertikal bahwa pertanggungjawaban atas pengelolaan dana APBD oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, dan pengelolaan dana APBN oleh Pemerintah Pusat kepada MPR selanjutnya pertanggungjawaban atas pengelolaan dana APBD oleh unit-unit kerja (dinas daerah) kepada Pemerintah Daerah sudah dilaksanakan secara akuntabel.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dito Aditia Darma Nasution (2018) dengan judul Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, hasil penelitiannya menyatakan bahwa secara parsial pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Pesi Suryani (2019) dengan judul Pengaruh Partisipasi Publik, Akuntabilitas, Transparansi dan Integritas Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Bengkulu Tengah, hasil penelitiannya menyatakan bahwa Partisipasi public, Integritas dan Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Maria Laetitia Boliina Kromen, Dkk (2023) dengan judul Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah), hasil temuannya menyatakan bahwa Akuntabilitas berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Hasil dari pengujian hipotesis transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dikarenakan pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,507 maka keputusannya adalah menerima H_0 dan menolak H_2 artinya secara parsial variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel kinerja keuangan daerah. Walaupun pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah bukan berarti transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah tidak diperlukan di Kabupaten Rote Ndao karena bagaimanapun memberikan informasi yang jujur kepada masyarakat merupakan hak masyarakat untuk mengetahui pengelolaan sumber daya pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Rote Ndao belum benar-benar transparan. Khususnya pada indikator disclosure (pengungkapan) dimana responden beranggapan bahwa pemerintah daerah cukup baik dalam mengungkapkan seluruh aktifitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah kepada Masyarakat atau publik (stakeholders), serta pemerintah daerah juga cukup baik dalam mengungkapkan proses aktifitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dito Aditia Darma Nasution (2018) dengan judul Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, hasil penelitiannya menyatakan bahwa secara parsial transparansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Pesi Suryani (2019) dengan judul Pengaruh Partisipasi Publik, Akuntabilitas, Transparansi dan Integritas

Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Bengkulu Tengah, hasil penelitiannya menyatakan bahwa transparansi tidak terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pengaruh Pengawasan Internal Pengelolaan keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Hasil dari pengujian hipotesis pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dikarenakan pengaruh pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 maka keputusannya adalah menolak H_0 dan menerima H_3 , artinya secara parsial variabel pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Halim dan Iqbal, (2012:37) bahwa secara umum pengawasan dapat dirumuskan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Sehingga apabila pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah semakin baik maka kinerja keuangan daerah juga akan semakin baik, sebaliknya apabila pengawasan internal menurun maka kinerja keuangan daerah juga akan menurun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Rote Ndao belum dilaksanakan dengan maksimal. Khususnya pada indikator Pengukuran (Measurement) dimana responden beranggapan bahwa pemerintah daerah cukup baik dalam melakukan proses pengukuran yang benar dan berulang-ulang secara terus menerus serta pemerintah daerah juga kurang baik dalam melakukan proses pengukuran yang intensitasnya berbentuk pengukuran harian, mingguan atau bulanan. Selain itu, Indikator melakukan tindakan (Action) juga menggambarkan bahwa pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah belum dilaksanakan dengan maksimal dimana responden beranggapan bahwa pemerintah daerah cukup baik dalam melakukan tindakan follow-up terhadap hasil koreksi penyimpangan yang terjadi guna memperkecil kemungkinan penyimpangan yang berulang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Enita Binawati, Dkk. (2022) dengan judul Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dimana hasil temuannya menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Internal Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Hasil dari pengujian hipotesis akuntabilitas, transparansi dan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dikarenakan hasil uji serempak atau simultan pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05 maka keputusannya adalah H_0 di tolak dan H_a diterima. Artinya secara simultan atau bersama-sama variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (X_1), transparansi pengelolaan keuangan daerah (X_2), dan pengawasan internal keuangan daerah (X_3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja keuangan daerah (Y) di kabupaten Rote Ndao.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Putu Deddy Samtika Putra, Dkk (2021) dengan judul Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Transparansi

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

5. Penutup

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao sudah sangat akuntabel hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian indikator akuntabilitas vertikal sebesar 93% dengan kategori sangat baik dan rata-rata capaian indikator akuntabilitas horizontal sebesar 91,7% dengan kategori sangat baik. Namun pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao belum benar-benar transparan hal ini dikarenakan pemerintah daerah cukup baik dalam mengungkapkan seluruh aktifitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat atau publik (stakeholders), dengan capaian rata-rata indikator disclosure (pengungkapan) sebesar 60,9% dengan kategori cukup baik. Sementara pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao juga belum dilaksanakan secara maksimal, dimana responden beranggapan bahwa pemerintah daerah cukup baik dalam melakukan proses pengukuran yang berulang secara terus menerus serta pemerintah daerah juga kurang baik dalam melakukan proses pengukuran yang intensitasnya berbentuk pengukuran harian, mingguan atau bulanan. Capaian rata-rata indikator pengukuran (measurement) sebesar 58,6% dengan kategori cukup baik. Responden juga beranggapan bahwa pemerintah daerah cukup baik dalam melakukan tindakan follow-up terhadap hasil koreksi penyimpangan yang terjadi. Capaian rata-rata indikator melakukan tindakan (action) sebesar 61% dengan kategori cukup baik. Sedangkan kinerja keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao belum begitu baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator kemandirian keuangan daerah dimana persepsi responden beranggapan bahwa pemerintah daerah kurang mampu dalam menggali potensi dan sumber-sumber keuangan yang ada di daerah serta pemerintah daerah tidak mampu dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Capaian rata-rata indikator kemandirian keuangan daerah sebesar 35,9% dengan kategori tidak baik.

Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Rote Ndao dengan kata lain semakin bagus akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka kinerja keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao akan semakin meningkat. Transparansi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Rote Ndao yang artinya walaupun pengelolaan keuangan daerah sudah transparan, hal ini tidak akan mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao. Pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Rote Ndao, dengan kata lain semakin tinggi pengawasan internal yang dilakukan terhadap pengelolaan keuangan daerah maka kinerja keuangan daerah Kabupaten Rote Ndao akan semakin meningkat. Akuntabilitas, transparansi dan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao, yang artinya apabila pemerintah daerah Kabupaten Rote Ndao secara bersama-sama menerapkan akuntabilitas, transparansi dan pengawasan internal dalam mengelola keuangan daerah maka kinerja keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao akan semakin meningkat.

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dilakukan maka saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Rote Ndao perlu mengungkapkan seluruh proses aktifitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat atau publik (stakeholders), agar dapat memaksimalkan transparansi dalam mengelola keuangan. Pemerintah daerah Kabupaten Rote Ndao perlu melakukan proses pengukuran berulang-ulang secara terus menerus yang intensitasnya berbentuk pengukuran

harian, mingguan atau bulanan agar dapat memaksimalkan pengawasan dalam mengelola keuangan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Rote Ndao perlu meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah agar dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Rote Ndao dan tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pusat.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2023. Statistik Kabupaten Rote Ndao.
- Chifniyatul Ulya, dkk. 2018. *Analisis Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab Tegal, BUMD Kab Tegal, Ikatan Profesi Notariat Kab Tegal, Camat dan Lurah Kab Tegal)*. Universitas Wahid Hasyim Semarang, Vol. 13 No. 2 hal. 63-79.
- Dito Aditia Darma Nasutio. 2017. *Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*. Universitas Pembangunan Panca Budi, Vol. 2 No. 3 hal. 149-162.
- Fanny Jitmau, dkk. 2017. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong)*. Program MM Universitas Sam Ratulangi, Vol. 8 No. 1 hal. 276-285
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Halim, A dkk. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Krina, dkk. 2013. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta : Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Mahmudi. 2016. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik, edisi terbaru*. Penerbit : Andi Yogyakarta
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 tahun 2020 tentang *pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah*.
- Pesi Suryani. 2019. *Pengaruh Partisipasi Publik, Akuntabilitas, Transparansi dan Integritas Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Bengkulu Tengah*. Universitas Terbuka Bengkulu, Vol. 9 No. 1 hal. 33-44
- PP No. 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Riswanto, Natak. 2016. *Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember*. Artikel Ilmiah Mahasiswa <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/75336>
- Scott, R. William. 2015. *Financial Accounting Theory, Seventh Edition*. Pearson Prentice Hall: Toronto.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit : Alfabeta, Bandung.
- Tari Mellisa Rafar, dkk. 2015. *Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara)*. Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Vol. 4 No. 2 hal 67-71
- Toni Nurhadianto, dkk. 2019. *Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah : Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung*. Jurnal Technobiz Vol. 3 No. 5 hal 25-30.
- Ulum, Ihyaul. 2015, *Intellectual Capital Konsep dan Kajian Empiris*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

- Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang *penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme*.
- Undang-Undang Provinsi No. 23 Tahun 2014 tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Wiguna, dkk. 2015. *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng*. Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 3 No.1.
- Yuqa Diana Khairi, dkk. 2021. *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. UNDIP, Vol. 10 No. 4 hal 1-9.
- Zulkifli Umar, dkk. 2018. *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh*. Universitas Muhammadiyah Aceh, Vol. 6 No.2 hal 136-148